



KEPEMIMPINAN HUMANIS DALAM PEMBINAAN WARGA BINAAN

Iwan Kurniawan¹, Budi Priyatmono²

^{1,2} Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia
e-mail: iwan10324@gmail.com¹, budi.prym@gmail.com²

Accepted: 14/4/2025; Published: 15/4/2025

ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam membina warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang bertanggung jawab dan taat hukum. Dalam proses pembinaan tersebut, peran kepemimpinan sangat krusial, terutama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan perilaku dan rehabilitasi warga binaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kepemimpinan humanis dalam pembinaan warga binaan dengan menggunakan metode studi literatur. Kepemimpinan humanis merupakan pendekatan yang menekankan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, seperti empati, keadilan, penghargaan terhadap martabat individu, dan dukungan terhadap pengembangan potensi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemimpin yang mengedepankan nilai-nilai humanis mampu menciptakan hubungan interpersonal yang sehat antara petugas dan warga binaan, meningkatkan partisipasi aktif warga binaan dalam program pembinaan, serta mempercepat proses reintegrasi sosial. Pendekatan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan.

Kata Kunci: Kepemimpinan Humanis, Pembinaan Warga Binaan, Pemasyarakatan.

ABSTRACT

Correctional institutions have a strategic role in fostering prisoners so that they can return to society as responsible and law-abiding individuals. In the fostering process, the role of leadership is very crucial, especially in creating an environment that supports behavioral change and rehabilitation of prisoners. This study aims to examine the application of humanist leadership in fostering prisoners using the literature study method. Humanist leadership is an approach that emphasizes respect for human values, such as empathy, justice, respect for individual dignity, and support for the development of human potential. The results of the study show that leaders who prioritize humanist values are able to create healthy interpersonal relationships between officers and inmates, increase active participation of prisoners in fostering programs, and accelerate the process of social reintegration. This approach is also in line with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections which emphasizes the importance of improving the quality of personality and independence of prisoners.

Keywords: Humanist Leadership, Prisoner Development, Correctional Facilities.

PENDAHULUAN

Lembaga pemasyarakatan (lapas) memiliki fungsi utama sebagai tempat pembinaan warga binaan agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, dan taat hukum. Warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu (Wulandari, 2015). Adanya model pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlepas dari dinamika yang bertujuan untuk menciptakan perubahan perilaku dan reintegrasi sosial yang efektif bagi para warga binaan (Utami, 2017). Dalam proses pembinaan ini, peran kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan tujuan pemasyarakatan. Kepemimpinan adalah kekuatan untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Purba & Subroto, 2023). Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akan pembinaan akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Kepemimpinan memegang peranan penting dalam menjaga situasi tetap aman, mendorong peningkatan kinerja petugas, dan menjamin tercapainya tujuan program pembinaan warga binaan (Utoyo, 2015). Kepemimpinan di lingkungan lapas tidak hanya menuntut kemampuan administratif dan pengendalian keamanan, tetapi juga membutuhkan pendekatan kemanusiaan yang mampu membangkitkan kesadaran, motivasi, dan perubahan perilaku warga binaan secara berkelanjutan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat proses pembinaan warga binaan berlangsung di bawah pembinaan petugas pemasyarakatan (Wulandari, 2012). Di lembaga pemasyarakatan dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat memimpin suatu organisasi. Kepemimpinan dalam lingkungan pemasyarakatan tidak bisa disamakan dengan model kepemimpinan dalam struktur birokrasi pada umumnya. Kepemimpinan yang efektif dan efisien akan terwujud apabila dijalankan berdasarkan fungsi dan tujuan yang telah ditetapkan (Mattayang, 2019). Pemimpin lapas tidak cukup hanya memiliki kemampuan administratif dan manajerial dalam mengatur sistem keamanan serta menjalankan tugas secara prosedural. Lebih dari itu, pemimpin di lapas dituntut memiliki kepekaan sosial, empati, dan kemampuan membangun relasi yang sehat dengan para warga binaan. Dalam konteks ini, pendekatan kepemimpinan humanis menjadi sangat penting, karena bersandar pada prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, termasuk mereka yang tengah menjalani masa hukuman.

Kepemimpinan humanis menempatkan warga binaan bukan sekadar sebagai subjek hukum, tetapi sebagai manusia yang memiliki potensi untuk berubah dan berkembang. Seorang pemimpin yang humanis tidak memperlakukan warga binaan hanya sebagai objek pembinaan yang pasif, melainkan mendorong mereka untuk berperan aktif dalam proses pemulihan diri atau reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial diartikan sebagai proses pembentukan norma atau nilai baru sebagai bentuk penyesuaian diri dengan lembaga atau organisasi yang telah mengalami perubahan (Wulandari, 2023). Pemimpin yang humanis juga menciptakan suasana yang kondusif, penuh penghargaan, dan jauh dari intimidasi, sehingga warga binaan merasa dihargai, didengar, dan memiliki harapan akan masa depan.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 10 disebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga binaan dan Anak Binaan”. Pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga pada pengembangan aspek psikologis, sosial, dan keterampilan individu agar siap kembali ke masyarakat. Pemimpin yang humanis tidak hanya mengarahkan program pembinaan secara struktural, tetapi juga membangun hubungan yang didasari empati, keadilan, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Untuk mencapai sistem pembinaan yang baik partisipasi bukan hanya datang dari petugas, tetapi juga dari masyarakat di samping warga binaan itu sendiri (Rahmat, 2018). Dengan memahami kebutuhan dan latar belakang warga binaan secara personal, pemimpin

mampu merancang dan mengimplementasikan kegiatan pembinaan yang lebih bermakna dan transformatif. Kepemimpinan humanis memastikan bahwa setiap warga binaan tidak diperlakukan sebagai objek hukuman semata, melainkan sebagai subjek pembangunan diri yang memiliki potensi untuk berubah dan berkontribusi positif di masa depan. Pendekatan ini sejalan dengan semangat UU Pemasyarakatan yang menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama dari sistem pemasyarakatan.

Dalam praktiknya, kepemimpinan humanis dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan konkret, seperti pendekatan personal kepada warga binaan, pelibatan mereka dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan pembinaan, serta penyediaan ruang dialog antara petugas dan warga binaan. Selain itu, pemimpin humanis juga menjadi teladan dalam sikap dan perilaku, menunjukkan integritas, keadilan, serta perhatian tulus terhadap proses perubahan individu.

Penerapan kepemimpinan humanis dalam pembinaan warga binaan juga sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yang menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Model kepemimpinan ini berkontribusi dalam menciptakan lingkungan lapas yang lebih sehat secara psikologis dan sosial, mengurangi resistensi, serta mempercepat proses internalisasi nilai-nilai positif dalam diri warga binaan. Dengan demikian, proses pembinaan tidak lagi bersifat searah dan koersif, melainkan menjadi proses dialogis yang mendukung pertumbuhan dan transformasi personal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tujuan dasar atau alasan rasionalisasi diadakannya penelitian survey (Creswell, 2014). Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) sebagai pendekatan utama untuk mengkaji penerapan kepemimpinan humanis dalam pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Studi literatur merupakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis, baik dari buku, artikel ilmiah, jurnal,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan humanis merupakan pendekatan kepemimpinan yang menekankan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, seperti empati, keadilan, penghargaan terhadap martabat individu, serta orientasi pada pengembangan potensi manusia. Pendekatan ini memandang bahwa setiap individu, termasuk warga binaan, memiliki kapasitas untuk berubah dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Kepemimpinan humanis tidak bersifat otoriter atau koersif, melainkan lebih bersandar pada nilai-nilai dialog, rasa saling percaya, dan pembinaan yang berbasis kesadaran. Dalam konteks organisasi, pemimpin humanis menempatkan relasi antarindividu sebagai fondasi utama dalam membangun lingkungan kerja yang inklusif dan suportif.

Di lembaga pemasyarakatan, penerapan kepemimpinan humanis menjadi sangat penting mengingat karakteristik warga binaan sebagai individu yang sedang menjalani proses rehabilitasi sosial dan psikologis. Mereka adalah kelompok rentan yang membutuhkan pendekatan pembinaan berbasis empati dan pemulihan moral, bukan sekadar penegakan aturan dan kontrol. Melalui pendekatan humanis, warga binaan tidak dipandang hanya sebagai pelanggar hukum, tetapi juga sebagai manusia yang memiliki latar belakang, harapan, dan kebutuhan akan bimbingan yang konstruktif. Dengan demikian, pemimpin di lapas memiliki tanggung jawab bukan hanya administratif, tetapi juga moral dan sosial dalam mendorong proses transformasi perilaku warga binaan.

Kepemimpinan humanis menekankan pentingnya relasi yang saling menghormati antara pemimpin dan bawahan, serta antara petugas pemasyarakatan dan warga binaan. Pemimpin bertindak sebagai fasilitator perubahan, bukan sekadar pengarah atau pengendali sistem. Ia

menciptakan ruang interaksi yang terbuka dan aman, di mana warga binaan merasa didengar, dihargai, dan diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam proses pembinaan. Pendekatan ini mampu mengurangi resistensi, meningkatkan partisipasi aktif warga binaan, dan membangun iklim lapas yang lebih sehat secara emosional dan sosial.

Studi oleh Wijaya (2020) menunjukkan bahwa kepemimpinan yang mengedepankan pendekatan personal, dialogis, dan penuh penghargaan terhadap warga binaan mampu menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih positif dan produktif. Dalam temuan tersebut, warga binaan menunjukkan peningkatan dalam kedisiplinan, keterlibatan dalam program pelatihan, serta semangat untuk memperbaiki diri. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan yang berfokus pada kemanusiaan memiliki efektivitas lebih tinggi dibandingkan metode pembinaan yang bersifat represif. Oleh karena itu, transformasi paradigma kepemimpinan di lembaga pemasyarakatan menuju model humanis menjadi sebuah keniscayaan dalam upaya reformasi sistem pemasyarakatan nasional.

Hal ini membuktikan bahwa pendekatan kepemimpinan yang berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan memiliki efektivitas lebih tinggi dibandingkan metode pembinaan yang bersifat represif dan otoriter. Kepemimpinan humanis tidak hanya memberikan hasil dalam jangka pendek berupa ketertiban, tetapi juga berdampak jangka panjang dalam membentuk perilaku positif dan kesiapan reintegrasi sosial setelah masa hukuman selesai. Oleh karena itu, transformasi paradigma kepemimpinan di lembaga pemasyarakatan menuju model humanis menjadi sebuah keniscayaan dalam upaya reformasi sistem pemasyarakatan nasional. Hal ini memerlukan dukungan kebijakan yang progresif, pelatihan kepemimpinan berbasis nilai, serta perubahan budaya organisasi di lingkungan pemasyarakatan agar lebih responsif terhadap kebutuhan rehabilitasi warga binaan secara utuh.

KESIMPULAN

Kepemimpinan humanis merupakan pendekatan strategis yang sangat relevan dalam pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan ini menekankan nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, keadilan, penghargaan terhadap martabat individu, dan pengembangan potensi pribadi. Pemimpin yang humanis tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan pengendalian, tetapi juga bertindak sebagai fasilitator perubahan yang menciptakan ruang pembinaan yang dialogis, inklusif, dan bermakna. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pembinaan ditujukan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan, yang secara substansial sangat sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan humanis.

Penerapan kepemimpinan humanis terbukti mampu menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih positif, produktif, dan transformatif. Hal ini tercermin dari meningkatnya kedisiplinan, keterlibatan, serta semangat perubahan dalam diri warga binaan, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai studi, termasuk oleh Wijaya (2020). Oleh karena itu, transformasi paradigma kepemimpinan di lembaga pemasyarakatan menjadi semakin penting untuk mendukung keberhasilan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan. Perubahan ini memerlukan sinergi antara kebijakan yang mendukung, peningkatan kompetensi kepemimpinan yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan, serta komitmen semua pihak dalam membangun budaya organisasi yang lebih berorientasi pada pemulihan dan pengembangan manusia. Dengan demikian, kepemimpinan humanis bukan hanya sebuah pendekatan, melainkan kebutuhan mendasar dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang manusiawi, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). Design Research kuantitatif Kualitatif. *Annaba*, 12.
- Mattayang, B. (2019). Tipe Dan Gaya Kepemimpinan: Suatu Tinjauan Teoritis. *JEMMA / Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 45.
- Purba, J. A., & Subroto, M. (2023). Analisis Tipe-Tipe Kepemimpinan di Lembaga Pemasarakatan. *JHIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4), 2168–2172.
- Rahmat, D. (2018). Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasarakatan. *Pranata Hukum*, 13(2), 181–186.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
- Utami, P. N. (2017). Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(3), 381.
- Utoyo, M. (2015). Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level. *Pranata Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 37–48.
- Wulandari, S. (2012). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 9(2), 131–142.
- Wulandari, S. (2015). Fungsi Sistem Pemasarakatan Dalam Merehabilitasi Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasarakatan. *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 4(Vol 4, No 2 (2015)), 87–94.
- Wulandari, S. (2023). Reintegrasi Sosial Dalam Sistem Pemasarakatan Sebagai Visi Pemidanaan Dalam Hukum Nasional. *Jurnal Penelitian*, 3(2), 26–36.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)